

Media Cetak	Harian Fajar
Tanggal	Kamis 30 Januari 2025
Wilayah	Kota Parepare



## Kasus Korupsi Diskes Parepare Mandek

# Kasus Korupsi Diskes Parepare Mandek

**PAREPARE, FAJAR** — Pengembangan kasus korupsi Dinas Kesehatan (Diskes) Parepare disoroti karena dinilai mandek. Setelah enam bulan berlalu setelah dilakukan penggeledahan di Pemkot Parepare, Polda Sulsel belum memberikan kejelasan.

Perkembangan kasus korupsi Dana Alokasi Khusus (DAK) Dinas Kesehatan Parepare 2017-2018 ini dianggap terkandung-katung di Polda Sulsel. Diketahui pihak Polda Sulsel melakukan penggeledahan rumah Eks Kabag Pembangunan Kota Parepare dan Kantor Diskes pada 19 Juli 2024.

Padahal, kasus korupsi ini diduga merugikan negara Rp6,3 miliar. Kasus korupsi Diskes Parepare muncul di permukaan pada 2019.

Kasus itu pun langsung menyeret nama mantan Kepala Dinas Kesehatan Pare-

pare, dr Muh Yamin. Termasuk bendaharanya saat itu bernama Sandra.

Awalnya, pada anggaran 2017-2018 Diskes Parepare mendapatkan DAK Rp40 miliar dari pusat. Peruntukannya di berbagai kegiatan, seperti pembinaan Posyandu, pelayanan pengobatan tradisional, pemanfaatan wilayah, dan peningkatan imunisasi.

Aparat penegak hukum (APH) kemudian mencium adanya korupsi karena dana tersebut diduga raib sebesar Rp2,9 miliar pada 2018. Namun belakangan bertambah Rp6,3 miliar sesuai hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) saat itu.

Koordinator Badan Pekerja Komite Masyarakat Anti Korupsi (KMAK) Sulselbar, Djusman AR menyoroti kasus korupsi DAK Dinas Kesehatan Kota Parepare 2017-

2018 yang sedang mandek. Menurutnya, kasus tidak ada perkembangan setelah APH melakukan penggeledahan rumah Eks Kabag Pembangunan Kota Parepare dan Kantor Dinas Kesehatan, 19 Juli 2024 lalu.

Sebelumnya, kasus ini telah ada terpidananya. Namun pihak penyidik Polda Sulsel kembali melakukan penggeledahan yang diduga terkait dengan kasus di Dinkes Parepare.

Djusman juga mempertanyakan motif dari penggeledahan tersebut. Menurutnya penggeledahan yang dilakukan APH jangan sampai tidak jelas.

"Karena yang kita pahami, penggeledahan itu dilakukan tentu karena penyidik berpendapat atau telah menemukan fakta-fakta baru yang belum terbuka pada penanganan perkara sebelumnya yang menyatakan putus-

an terhadap beberapa orang. Nah inilah yang dituntut oleh publik," beber Djusman.

Djusman menambahkan, jika memang hasil penggeledahan itu dinyatakan tidak cukup bukti, tetap harus ada kepastian hukum. "Jika unsur tidak terpenuhi, hentikan atau jawab atau SP3. Namun jika buktinya memang cukup, lanjutkan. Kita tidak ingin, jangan sampai penggeledahan itu dilakukan kurang lebih atau seolah-olah hanya ingin melakukan getakan (menakut-nakuti)," tambahnya.

Sebelumnya, Pemkot Parepare merespons penggeledahan yang dilakukan Polda Sulsel saat itu Pj Wali Kota Parepare yang menjabat adalah Akbar Ali. Akbar Ali mendukung langkah penyidik Ditreskrimsus Polda Sulsel untuk mengusut tuntas kasus korupsi di Parepare.

Setelah Ditreskrimsus Pol-

da Sulsel menggeledah dan membawa sejumlah berkas dari gudang arsip, Akbar Ali menyatakan dukungan pengusutan kasus korupsi di Parepare. "Kami sebagai pemerintah kota mendukung. Yang dilakukan oleh penegak hukum dalam rangka (pengusutan) terkait permasalahan yang tidak terlepas dari kasus masalah apapun itu," katanya.

Akbar Ali mengutarakan penggeledahan di gudang arsip Kantor Wali Kota Parepare telah melewati Standar Operasional Prosedur (SOP) yang dilakukan Polri. "Jelas, kami tahu karena itu sesuai SOP, dan pihak kepolisian memahami itu," tegasnya.

Terpisah, Dirkrimsus Polda Sulsel Kombes Dedi Supriyadi saat dihubungi FAJAR terkait perkembangan pengembangan kasus korupsi tersebut belum merespons.

(ams/mum)